



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: 1. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti RI. 2. Dirjen Belmawa Kemenristekdikti RI.
Hari/Tanggal	: Senin, 26 September 2016.
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI,
Pimpinan Rapat	: Drs. Utut Adianto /Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: Pendalaman RKA K/L TA 2017.
Hadir	: 31 orang dari 51 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: 1. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti RI beserta jajarannya. 2. Dirjen Belmawa Kemenristekdikti RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.45 WIB oleh Drs. Utut Adianto/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Dirjen Belmawa Kemenristekdikti RI, dan Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti RI, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. DITJEN SUMBER DAYA IPEK DAN DIKTI KEMENRISTEKDIKTI RI

1. Pagu anggaran (sementara) Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemeristekdikti RI RAPBN TA 2017 sebesar Rp 1,262 triliun mengalami penurunan sebesar Rp175 miliar atau 12,18 persen terhadap pagu anggaran (sementara) RAPBN TA 2016 sebesar Rp 1,437 triliun.

2. Mengingat data dosen sertifikasi yang disajikan masih belum konsisten antara data di Sekjen, dan PDPT, Komisi X DPR RI mendesak Kemenristekdikti RI untuk memverifikasi dan memvalidasi kembali jumlah dosen yang lulus sertifikasi dan yang telah menerima SK, yang akan dijadikan rujukan penentuan RAPBN TA 2017.
3. Terhadap program usulan peningkatan sarana dan prasarana PTN, Komisi X DPR RI memutuskan:
 - a. Usulan anggaran sebesar Rp110 miliar sebagai ganti rugi pembebasan lahan jalan tol di UI, Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk mengkaji terlebih dahulu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang.
 - b. Meminta Kemenristekdikti RI untuk menyusun kebijakan program peningkatan sarana dan prasarana PTN yang lebih transparan dan akuntabel agar bagi beberapa PTS yang telah berubah menjadi PTN baru tidak ingin beralih kembali menjadi PTS.
 - c. Akan melakukan kunjungan spesifik ke beberapa PTN Baru dan harus didampingi Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti RI.

B. DITJEN BELMAWA KEMENRISTEKDIKTI RI

1. Pagu anggaran (sementara) Ditjen Belmawa Kemenristekdikti RI RAPBN TA 2017 sebesar Rp 6,659 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp 596 miliar atau 9,83 persen terhadap pagu anggaran (sementara) RAPBN TA 2016 sebesar Rp6,063 triliun.
2. Komisi X DPR RI menetapkan bahwa:
 - a. Alokasi satuan biaya Bidikmisi untuk biaya hidup dari semula Rp600.000,-/bulan naik sesuai dengan indeks kemahalan wilayah (sekurang-kurangnya naik Rp100.000,-/bulan).
 - b. Seluruh biaya seleksi calon mahasiswa baru melalui SNMPTN dan SBMPTN ditanggung APBN.
 - c. Kemenristekdikti RI perlu memperbaiki kebijakan, sistem, dan prosedur penerima bidikmisi-PPA-ADiK, dan PPGT, pencairan anggaran, dan evaluasinya.
 - d. Kemeristekdikti RI perlu menghitung kembali alokasi anggaran Bidikmisi, SNMPTN, dan SBMPTN.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenristekdikti RI untuk mengkaji kebutuhan anggaran cek kesehatan (narkoba dan HIV) terhadap calon penerima beasiswa.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul **13.30** WIB

KETUA RAPAT,



DRS. UTUT ADIANTO